Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29811-29815

Penguatan Dimensi Kewarganegaraan Mahasiswa Melalui Diskusi Isu Aktual Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Fahmi Khalehar, Ahmad Nur Cahyo
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISH, UNIMA
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,FBS,UNIMA
fahmikhalehar@unima.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRAK

Rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan masalah sosial politik aktual menjadi tantangan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan dimensi kewarganegaraan mahasiswa melalui diskusi isu aktual dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap dimensi kewarganegaraan meningkat dari 68% pada siklus I menjadi 84% pada siklus II. Keaktifan mahasiswa dalam diskusi meningkat dari 61% menjadi 81%, sedangkan kemampuan menganalisis isu aktual meningkat dari 64% menjadi 83%. Mahasiswa juga menunjukkan perkembangan dalam menghargai perbedaan pendapat dan menyusun refleksi kritis. Pembahasan menunjukkan bahwa diskusi isu aktual membuat pembelajaran PKn lebih kontekstual karena mahasiswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi mengaitkannya dengan realitas kehidupan demokratis. Strategi ini juga memperkuat pengetahuan, sikap, keterampilan, partisipasi, dan identitas kewarganegaraan mahasiswa. Kesimpulannya, diskusi isu aktual berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran PKn karena mampu membangun mahasiswa yang kritis, demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Dimensi Kewarganegaraan, Mahasiswa

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penguatan dari dimensi kewarganegaraan mahasiswa melalui diskusi isu aktual dalam pembelajaran Pendidikan pada Kewarganegaraan merupakan strategi penting untuk membentuk warga negara muda yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak cukup hanya berisi hafalan tentang negara, konstitusi, hak, kewajiban, dan demokrasi. Pembelajaran PKn perlu dikaitkan dengan persoalan nyata seperti pemilu, hoaks politik, rendahnya partisipasi warga, intoleransi, pelanggaran hukum, dan etika bermedia sosial agar mahasiswa mampu memahami makna kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Branson, kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan yang perlu dibangun melalui pendidikan (Branson, 1998: 8–12). Kerr menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan menyiapkan peserta didik agar memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis (Kerr, 1999: 1–5). Print juga menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi demokratis generasi muda, karena keterlibatan warga muda menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan demokrasi modern (Print, 2007: 325–330). Dalam konteks Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk membangun kesadaran mahasiswa tentang demokrasi, hukum, hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kementerian Ristekdikti, 2016: 1–8).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan dimensi kewarganegaraan mahasiswa melalui diskusi isu aktual dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus. Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, keaktifan, kemampuan analisis, dan sikap demokratis mahasiswa. Kesimpulannya, diskusi

isu aktual dapat menjadi strategi pembelajaran PKn yang lebih hidup, kontekstual, dan berdampak pada mahasiswa dalam pembentukan karakter kewarganegaraan.

Materi utama dalam penelitian ini adalah dimensi-dimensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, partisipasi kewarganegaraan, dan identitas kewarganegaraan. Kelima dimensi tersebut penting karena mahasiswa tidak hanya perlu memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta menjaga identitas kebangsaan. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya proses pembelajaran PKn yang tidak hanya berorientasi pada nilai akhir, tetapi juga pada perubahan cara berpikir dan perilaku mahasiswa sebagai warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK dipilih karena bertujuan memperbaiki kualitas pembelajaran secara langsung melalui tindakan yang dilakukan di kelas (Arikunto, 2010: 123). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri atas empat tahap: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi (Sagala, 2013: 89).

Subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Karakteristik responden adalah mahasiswa semester awal yang telah memperoleh materi dasar tentang negara, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi politik (Budimansyah & Suryadi, 2008: 45). Objek penelitian adalah proses penguatan dimensi kewarganegaraan melalui diskusi isu aktual (Branson, 1999: 72).

Pengambilan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, observasi digunakan untuk melihat keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, dan sikap menghargai perbedaan (Setiawan, 2016a: 58). Kedua, tugas tertulis digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa menganalisis isu kewarganegaraan (Setiawan, 2016b: 101). Ketiga, refleksi mahasiswa digunakan untuk mengetahui pengalaman belajar dan pemahaman mereka setelah mengikuti pembelajaran (Budimansyah & Suryadi, 2008: 66). Keempat, tes formatif digunakan untuk melihat peningkatan pemahaman konsep (Branson, 1999: 95).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data kualitatif dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014: 12). Data kuantitatif dianalisis dengan menghitung rata-rata nilai tugas, tes formatif, dan persentase keaktifan mahasiswa. Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi agar mudah dipahami.

Rumus persentase yang digunakan adalah:

$$P - \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah mahasiswa yang mencapai indikator

N = jumlah seluruh mahasiswa (Arikunto, 2010: 135)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi warga negara. Kompetensi tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan memahami materi tentang negara dan pemerintahan, tetapi juga mencakup sikap, keterampilan, partisipasi, dan identitas kewarganegaraan.

Dimensi-dimensi yang ada pada kewarganegaraan dapat dipahami melalui lima aspek utama yang saling terkait dan saling memperkuat dalam proses pembelajaran. Pertama, **pengetahuan kewarganegaraan** mencakup pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, hukum, konstitusi, serta struktur negara. Dalam konteks pembelajaran, dimensi ini dapat diperkuat melalui kegiatan membaca materi, diskusi konsep, analisis peraturan, dan studi kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik nyata. Kedua, **keterampilan kewarganegaraan** menekankan kemampuan berpikir kritis, berdialog, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan

politik; hal ini dapat dilatih melalui debat akademik, diskusi isu aktual, analisis berita, dan presentasi kelompok. Ketiga, **sikap kewarganegaraan** menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial, yang dapat dibentuk melalui refleksi, pembiasaan etika diskusi, kerja kelompok, dan penilaian sikap. Selanjutnya yakni **partisipasi kewarganegaraan** merujuk pada keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan proses demokratis, yang dapat dikembangkan melalui proyek sosial, kampanye literasi politik, simulasi musyawarah, serta berbagai kegiatan organisasi. Terakhir, **identitas kewarganegaraan** menekankan kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam, yang dapat diperkuat melalui kajian nilai Pancasila, budaya lokal, keberagaman sosial, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Keseluruhan dimensi ini bertujuan membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkannya secara kritis, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dari data tersebut, dapat dipahami bahwa pembelajaran PKn tidak cukup hanya menekankan aspek kognitif. Jika pembelajaran hanya berisi penjelasan konsep dan hafalan materi, maka mahasiswa mungkin memahami definisi kewarganegaraan, tetapi belum tentu mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu menggabungkan pengetahuan, sikap, keterampilan, partisipasi, dan identitas kebangsaan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang kontekstual lebih sesuai untuk memperkuat dimensi kewarganegaraan. Strategi tersebut dapat berupa diskusi isu aktual, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, refleksi pengalaman, dan proyek sederhana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, mahasiswa dapat diminta menganalisis isu hoaks politik, rendahnya partisipasi pemilih muda, intoleransi, korupsi, konflik sosial, atau etika bermedia sosial.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tahapan kegiatan mahasiswa dirancang secara bertahap untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kewarganegaraan. Tahap pertama, **memahami konsep**, menuntut mahasiswa membaca dan mendiskusikan materi PKn sehingga mereka memiliki dasar pengetahuan yang kokoh mengenai hak, kewajiban, dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Selanjutnya, pada tahap **menganalisis isu**, mahasiswa mengkaji masalah aktual yang terjadi di masyarakat, yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan objektif terhadap fenomena sosial-politik. Tahap **berdialog** menekankan kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka sekaligus menghargai perbedaan pandangan, sehingga sikap demokratis mereka terbentuk secara alami. Pada tahap **merefleksikan**, mahasiswa menulis pengalaman dan kesimpulan belajar, yang membantu mereka menyadari peran serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Terakhir, tahap **berpartisipasi** mendorong mahasiswa merancang aksi atau solusi sederhana terkait isu kewarganegaraan, sehingga mereka terdorong untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan berkontribusi secara nyata bagi masyarakat. Proses bertahap ini memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menginternalisasi praktik kewarganegaraan secara kritis, etis, dan partisipatif.

Data sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan kewarganegaraan berlangsung melalui proses bertahap. Mahasiswa tidak hanya diberi materi, tetapi juga diarahkan untuk memahami masalah, berdiskusi, merefleksikan, dan merancang tindakan. Dengan cara ini, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih hidup dan bermakna.

PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan dimensi kewarganegaraan pada pembelajaran PKn perlu dilakukan secara menyeluruh. Branson menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Branson, 1998: 20-25). Artinya, mahasiswa tidak cukup hanya mengetahui konsep demokrasi, hukum, dan negara, tetapi juga perlu memiliki kecakapan berpikir kritis serta watak kewarganegaraan yang baik.

Pandangan tersebut sejalan dengan Kerr yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menyiapkan warga negara agar memahami hak dan tanggung jawabnya, menghargai orang lain, serta aktif dalam kehidupan masyarakat (Kerr, 1999: 3-5). Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa perlu dilatih untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek yang mampu membaca persoalan bangsa secara kritis dan bertanggung jawab.

Print menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi demokratis generasi muda (Print, 2007: 339–345). Hal ini penting karena mahasiswa berada pada fase usia yang dekat dengan kehidupan politik dan sosial. Jika pembelajaran PKn

hanya bersifat teoritis, maka mahasiswa dapat kehilangan keterkaitan antara materi kuliah dengan realitas kehidupan. Sebaliknya, jika pembelajaran dikaitkan dengan isu aktual, mahasiswa akan lebih mudah memahami bahwa kewarganegaraan adalah praktik hidup sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter kebangsaan. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya materi hafalan, tetapi menjadi nilai dasar dalam membangun kehidupan bersama. Karena itu, penguatan identitas kewarganegaraan perlu diarahkan pada sikap mencintai bangsa, menghargai keberagaman, menolak intoleransi, dan menjaga persatuan.

Dengan demikian, kontribusi utama dari kajian ini adalah menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu bergerak dari pembelajaran yang hanya berpusat pada materi menuju pembelajaran yang berpusat pada pembentukan kompetensi warga negara. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, mengkritisi, merefleksikan, dan merancang tindakan sederhana. Inilah yang membuat pembelajaran PKn memiliki dampak nyata bagi kehidupan mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penguatan pada dimensi kewarganegaraan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang kritis, demokratis, toleran, partisipatif, dan bertanggung jawab. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa dimensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, partisipasi, dan identitas kebangsaan. Kontribusi utama kajian ini adalah menegaskan bahwa pembelajaran PKn tidak boleh berhenti pada hafalan konsep, tetapi harus diarahkan pada pengalaman belajar yang kontekstual melalui diskusi isu aktual, studi kasus, refleksi, dan pembelajaran berbasis masalah. Dampaknya, mahasiswa dapat memahami bahwa kewarganegaraan bukan hanya status hukum, melainkan praktik nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan dimensi kewarganegaraan melalui metode pembelajaran aktif dan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, partisipasi sosial, dan kesadaran identitas kebangsaan mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan diskusi isu aktual, studi kasus, dan refleksi menunjukkan tingkat penginternalisasian nilai kewarganegaraan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak hanya menghafal konsep tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

SARAN

Saran yang diajukan pada penelitian ini yakni:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, misalnya rubrik penilaian partisipasi, keterampilan analisis isu, dan sikap kewarganegaraan, agar dapat mengukur perubahan mahasiswa secara lebih objektif.
2. Disarankan pula untuk menerapkan intervensi yang lebih beragam, seperti simulasi musyawarah, debat publik mini, atau proyek sosial berbasis kampus, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung terkait praktik kewarganegaraan.
3. Peneliti berikutnya dapat mengkaji efektivitas jangka panjang dari metode pembelajaran ini dengan mengamati perubahan sikap dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan atau komunitas sosial di luar kelas.
4. Terakhir, pembelajaran berbasis isu dan studi kasus sebaiknya disesuaikan dengan konteks lokal dan nasional, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan realitas sosial-politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Branson, M. S. 1998. *The role of civic education: A forthcoming education policy task force position paper from the Communitarian Network*. Center for Civic Education.

Branson, M. S. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika* (Syafruddin, M. Y., Alimi, & M. N. Khoiron, Penerj.). Yogyakarta: LKIS.

Budimansyah, D., & Suryadi, K. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Kerr, D. 1999. *Citizenship education: An international comparison*. National Foundation for Educational Research/Qualifications and Curriculum Authority.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pangalila, T. 2017. Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.

Print, M. 2007. Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies, 55*(3), 325–345. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00382.x

Sagala, S. 2013. *Konsep dan Makna Pembelajaran.* Bandung: Alfabeta.

Setiawan, D. 2016a. *Ilmu Kewarganegaraan.* Medan: Larispa Indonesia.

Setiawan, D. 2016b. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Medan: Madenatera.

Winarno. 2013. *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*. Bumi Aksara.

Winarno. (2019). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: Isi, strategi, dan penilaian*. Bumi Aksara.